

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan program Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas Program PONED di Kabupaten Kebumen

Program PONED di Kabupaten Kebumen telah tepat dari sisi kebijakan, karena dirumuskan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan *obstetri* dan *neonatal* serta didukung oleh dasar regulasi yang jelas. Namun demikian, secara keseluruhan program belum efektif secara komprehensif. Hal ini ditunjukkan oleh belum terpenuhinya empat prinsip ketepatan lainnya, yaitu tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Ketepatan pelaksana masih terkendala oleh keterbatasan jumlah puskesmas mampu PONED, kesiapan dan distribusi tenaga kesehatan terlatih, serta koordinasi antarpelaksana yang belum optimal. Ketepatan target belum sepenuhnya tercapai karena pemanfaatan layanan PONED oleh masyarakat sasaran masih belum merata. Ketepatan lingkungan dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah serta faktor sosial budaya masyarakat yang memengaruhi pengambilan keputusan rujukan. Sementara itu, ketepatan proses belum sepenuhnya terpenuhi akibat masih ditemukannya kendala pada alur pelayanan dan sistem rujukan yang berdampak pada keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program PONED

Program Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Kebumen didukung oleh komunikasi vertikal antara Dinas Kesehatan dan puskesmas mampu PONED yang telah berjalan melalui sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis, komitmen serta sikap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan PONED, serta keberadaan pedoman teknis, alur rujukan, dan pembagian kewenangan yang jelas dalam struktur birokrasi. Namun demikian, pelaksanaan program masih dihadapkan pada faktor penghambat utama berupa keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan terlatih PONED, dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai, serta keterbatasan transportasi rujukan. Faktor-faktor tersebut memengaruhi kesiapsiagaan dan kelancaran pelayanan kegawatdaruratan *obstetri* dan *neonatal* di tingkat pelayanan dasar.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Kebumen, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari prinsip tepat pelaksana, program PONED belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan terlatih serta tingginya beban kerja pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan tenaga kesehatan PONED, penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, serta pengaturan beban kerja yang lebih proporsional guna mendukung kesiapsiagaan pelayanan selama 24 jam.

2. Dari prinsip tepat target, pemanfaatan layanan PONED oleh masyarakat sasaran belum merata, yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dan hambatan akses pelayanan. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan komunikasi dan sosialisasi layanan PONED secara berkelanjutan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.
3. Dari prinsip tepat lingkungan, efektivitas program masih terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan serta kondisi geografis wilayah yang memengaruhi akses rujukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan sarana prasarana, termasuk fasilitas pelayanan, sistem transportasi, dan dukungan anggaran, guna memperkuat lingkungan pendukung pelaksanaan program.
4. Dari prinsip tepat proses, program PONED belum berjalan optimal karena koordinasi antarpelaksana dan mekanisme rujukan yang dalam kondisi tertentu masih mengalami keterlambatan. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi horizontal antarfasilitas kesehatan serta penyempurnaan alur dan sistem rujukan agar proses pelayanan kegawatdaruratan dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
5. Ditinjau dari faktor penghambat komunikasi dan struktur birokrasi, koordinasi horizontal belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas fasilitas dan lintas sektor melalui forum koordinasi rutin dan kejelasan peran antarpelaksana dalam pelayanan kegawatdaruratan *obstetri* dan *neonatal*.